

IMPLEMENTASI AKUNTANSI KEBERLANJUTAN PADA INSENTIF

KARBON DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SKRIPSI

UNTUK SEMINAR PROPOSAL



Oleh:

DIAH FITRIANI

2101036151

S1 AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025**

DAFTAR ISI	2
BAB I	3
PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	11
1.4.2. Manfaat Praktis.....	12
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori dan Tinjauan Literatur	13
2.1.1. Teori Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Theory).....	13
2.1.2. Teori Akuntabilitas (Accountability Theory).....	14
2.1.3. Teori Keterbatasan Sumber Daya Manusia (Berbasis Resource Based View)	16
2.1.4. Keberlanjutan di Pemerintah Daerah.....	18
2.1.5. Akuntansi karbon dan REDD+.....	20
2.2 Studi Terdahulu	20
2.3 Kerangka Pemikiran	21
BAB III	23
METODE PENELITIAN	23
3.1. Pendekatan Penelitian	23
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	24
3.3. Fokus Penelitian	25
3.4. Subjek dan Informan Penelitian	26
3.5. Jenis dan Sumber Data	27
3.6. Metode Pengumpulan Data	28
3.7. Pedoman Wawancara	34
3.8. Teknik Analisis Data	36
3.9. Prosedur Penelitian	37
<i>Lampiran 1</i>	40

<i>Lampiran 2</i>	42
<i>Lampiran 3</i>	44
DAFTAR PUSTAKA	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberlanjutan adalah sebuah konsep dalam pembangunan yang dibuat dalam upaya memenuhi kebutuhan generasi saat ini yang dilakukan tanpa mengorbankan generasi yang akan datang. Dalam hal ini untuk upaya pengelolaan keberlanjutan menuntut adanya keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan ekologi sehingga pengelolaan sumber daya alam tidak tereksplorasi melampaui kemampuan alam untuk berkembang.

Keberlanjutan juga berperan penting sebagai integrasi aspek lingkungan dan sosial dalam pengambilan keputusan, sehingga tidak hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek melainkan juga untuk mendukung keberlangsungan lingkungan jangka panjang, berdasarkan prinsip keberlanjutan yang bertujuan untuk membangun hubungan manusia dengan alam dan juga untuk menjamin generasi yang akan datang masih dapat menikmati manfaat sumber daya alam yang ada saat ini. (Andani et al. 2024)

Saat ini isu perubahan iklim merupakan salah satu topik yang penting yang menjadi sorotan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kenaikan suhu rata-rata dan juga pergeseran habitat satwa liar, naiknya permukaan air laut, hingga bencana alam. Perubahan iklim muncul akibat aktivitas manusia yang menimbulkan efek gas rumah kaca (Rahmasari and Bandiyono 2025)

Pemanasan global dan dampaknya terhadap lingkungan telah mendorong akan pentingnya upaya – upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan

mencegah konsekuensi buruk dari perubahan iklim (IPCC,2021). (Rahmasari and Bandiyono 2025)

Perjanjian Paris pada tahun 2015 juga merupakan salah satu langkah dunia untuk melawan perubahan iklim. Poin dalam perjanjian ini adalah kewajiban setiap negara untuk menetapkan target pengurangan emisi masing – masing yang dikenal sebagai Nationally Determined Contributions (NDCs). Setiap negara bertanggung jawab untuk menentukan kontribusi mereka dalam mencapai tujuan global untuk membatasi kenaikan suhu global. (Rahmasari and Bandiyono 2025)

Di Indonesia sendiri juga tak luput dari permasalahan sosial yang kompleks seperti kemiskinan, akses pendidikan yang masih rendah, akses kesehatan yang masih sulit, kesejahteraan sosial dan kesenjangan isu lingkungan dan sebagainya. (Juan Hendrian Pratama and Syaiful Rahman Soenaria 2024). Perlu adanya penanganan untuk mengatasi permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjadi landasan utama dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, yang memungkinkan pencatatan keuangan lebih komprehensif termasuk potensi integrasi aspek sosial dan lingkungan. Di tingkat, permendagri No. 64 Tahun 2013 mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun dan menerapkan kebijakan akuntansi sesuai SAP, yang kemudian di terjemahkan dalam bentuk peraturan daerah (Perda), peraturan Walikota (Perwal), atau peraturan Gubernur (Pergub) terkait kebijakan akuntansi daerah. Selain itu, PMK No.

225.05/2016 memberikan panduan teknis untuk pemerintah pusat dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Indonesia kini juga telah berkomitmen untuk ambisinya dalam menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui Enhanced Nationally Determined Contributions (ENDC) sebesar 31,89% (dari sebelumnya 29%) tanpa syarat dan sebesar 43,2% (dari sebelumnya 41%) secara kondisional (Kementerian Keuangan, 2022) (Rahmasari and Bandiyono 2025)

Kesadaran pemerintah daerah akan isu keberlanjutan sudah meningkat, dalam implementasinya sendiri pemerintah mulai mengembangkan pendekatan yang lebih intens kepada REDD+ dengan memasukkan kebijakan pasar ke dalam strategi pembangunan emisi yang lebih luas. (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta 2024).

Pentingnya peran pemerintah dalam proses pendekatan yuridisksional REDD+ ini juga merupakan salah satu alasan untuk mempunyai kewenangan mengelola sumber daya alam dan pemanfaatan lahan di wilayahnya. (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta 2024).

Bagian penting dari pendekatan REDD+ ini adalah insentif berbasis kinerja yang memberikan kompensasi finansial bagi yang berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon. (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta 2024). Selain itu laporan ini tidak hanya mencerminkan penggunaan anggaran tetapi juga menilai dampak sosial dan lingkungan dari setiap kebijakan yang diambil, di Indonesia sendiri sudah ada provinsi Kalimantan Timur yang menjadi provinsi pertama penerima insentif karbon melalui skema

result-based payment dari Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) – Carbon Fund, sebagai penghargaan atas keberhasilan menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan REDD+. Dana ini perlu di kelola secara akuntabel dan dilaporkan kepada publik agar manfaatnya dirasakan masyarakat. Dalam hal ini Bappeda provinsi Kalimantan Timur berperan penting juga dalam mengintegrasikan insentif karbon dalam perencanaan pembangunan daerah (RPJMD), sedangkan Dinas Kehutanan bertanggung jawab terhadap pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV) pengurangan emisi. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan sistem akuntansi karbon, kurangnya pemahaman aparatur tentang pelaporan berbasis keberlanjutan, serta perlunya standar yang jelas untuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana karbon. (Cetera 2022)

Berdasarkan laporan Bank Dunia (2022) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), provinsi Kalimantan Timur telah dua kali menerima insentif karbon melalui skema *Forest Carbon Partnership Facility – Carbon Fund* (FCPF-CF). Pembayaran pertama pada tahun 2022 sebesar USD 20,9 juta atau sekitar 320 miliar sebagai *advance payment* atau reward awal, yang diberikan atas kesiapan Kalimantan Timur dalam melaksanakan program penurunan emisi dan tata kelola karbon yang transparan. Selanjutnya, pada tahun 2024, Kalimantan Timur kembali menerima pembayaran berbasis hasil (*Result – Based Payment*) senilai USD 114,7 juta atau sekitar 1,78 triliun setelah berhasil mencapai target penurunan emisi karbon yang telah diverifikasi secara independen. Pembayaran tersebut

disalurkan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten / Kota, serta lebih kurang 400 desa / kelurahan sebagai penerima manfaat. Hal ini menunjukkan bahwa Kalimantan Timur bukan hanya menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerima insentif karbon dari Bank Dunia, tetapi juga berhasil mempertahankan kinerjanya dalam penurunan emisi karbon secara berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas tersebut, maka perlu dilakukan kajian mendalam mengenai bagaimana implementasi keberlanjutan di pahami dan dijalankan oleh aparatur pemerintah daerah. Kajian ini penting bukan hanya untuk mengetahui sejauh mana kesadaran telah tumbuh, tetapi juga untuk mengidentifikasi hambatan struktural dan budaya organisasi yang menghambat transformasi menuju tata kelola keberlanjutan dan juga mengidentifikasi implementasi prinsip akuntabilitas dan pelaporan keberlanjutan dalam pengelolaan dana insentif karbon oleh aparatur pemerintah daerah. Harapannya, hasil kajian ini dapat menjadi landasan dalam perumusan kebijakan publik yang lebih akuntabel, partisipatif dan berwawasan lingkungan di tingkat lokal.

1.2. Rumusan Masalah

Pembangunan berkelanjutan menuntut adanya integrasi antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam setiap kebijakan publik. Pemerintah daerah sebagai pelaksana utama pembangunan memiliki peran strategis dalam memastikan prinsip keberlanjutan diimplementasikan secara nyata. Salah satu wujud konkret penerapan keberlanjutan adalah melalui pengelolaan insentif

karbon yang diberikan kepada daerah atas keberhasilannya menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan melalui program REDD+.

Provinsi Kalimantan Timur menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerima insentif karbon melalui skema Result-Based Payment (FCPF – Carbon Fund). Pengelolaan dana tersebut membutuhkan sistem akuntansi karbon dan pelaporan keberlanjutan yang akuntabel serta transparan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan pemahaman aparatur pemerintah, belum optimalnya mekanisme pencatatan dan pelaporan dana karbon, serta lemahnya sistem akuntabilitas publik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap konsep akuntansi karbon dan keberlanjutan dalam pengelolaan dana insentif karbon di Provinsi Kalimantan Timur?
2. Bagaimana mekanisme pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana insentif karbon berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi publik?
3. Apa saja hambatan dan upaya aparatur pemerintah dalam mengimplementasikan pelaporan keberlanjutan pada program insentif karbon (REDD+)?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menggali informasi pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana konsep pembangunan berkelanjutan diimplementasikan oleh pemerintah daerah, khususnya melalui perspektif aparatur pemerintah sebagai pelaksana utama kebijakan publik di tingkat lokal. Berikut tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap konsep akuntansi karbon dan keberlanjutan dalam pengelolaan dana insentif karbon.
2. Untuk menganalisis mekanisme pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana insentif karbon berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi publik.
3. Untuk mengidentifikasi hambatan serta upaya pemerintah daerah dalam mengimplementasikan pelaporan keberlanjutan pada program insentif karbon (REDD+).

1.4. Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik pemerintahan, khususnya dalam konteks implementasi prinsip keberlanjutan di tingkat pemerintah daerah. Mengingat keberlanjutan menjadi isu strategis yang semakin relevan di tengah krisis iklim, tekanan sosial, dan keterbatasan sumber daya alam, maka pemahaman mendalam mengenai bagaimana aparatur pemerintah merespons isu ini sangat penting. Oleh karena itu,

manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua sisi utama, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berperan dalam memperluas cakupan kajian ilmiah di bidang administrasi publik dan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada keberlanjutan. Penelitian ini tidak hanya membahas teori pembangunan berkelanjutan dalam pengertian umum, tetapi lebih menekankan pada bagaimana teori tersebut diterjemahkan ke dalam praktik pemerintahan daerah melalui persepsi dan peran aparatur sebagai pelaksana kebijakan. Dengan fokus tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam literatur akademik tentang hubungan antara birokrasi daerah, kesadaran lingkungan, dan akuntabilitas publik.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memperkuat pemahaman mengenai pentingnya pelaporan keberlanjutan dalam sektor publik. Jika selama ini praktik pelaporan keberlanjutan lebih banyak dikaji pada sektor swasta atau korporasi, maka penelitian ini mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan menghadirkan konteks pemerintah daerah sebagai subjek utama. Dengan begitu, penelitian ini dapat memperkaya teori tentang peran negara dalam mengintegrasikan dimensi sosial,

ekonomi, dan lingkungan ke dalam sistem pelaporan dan pengambilan keputusan publik.

Penelitian ini juga membuka ruang untuk pengembangan teori dalam konteks lokal di Kalimantan Timur, terutama mendalami adanya insentif karbon untuk Kalimantan Timur dalam upaya pengurangan emisi karbon.

1.4.2. Manfaat Praktis

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi para pengambil kebijakan di pemerintah daerah dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan. Informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi tingkat pemahaman dan kesiapan aparatur dalam melaksanakan prinsip-prinsip keberlanjutan secara operasional, mulai dari tahap perencanaan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan.

Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan mampu mendorong pemerintah daerah untuk memperhatikan pentingnya pelaporan keberlanjutan sebagai bagian dari pertanggungjawaban publik. Dengan mendorong adanya pelaporan yang transparan mengenai dampak sosial dan lingkungan dari setiap program pemerintah, masyarakat akan memiliki akses informasi yang lebih baik dan dapat turut serta mengawasi serta berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi instansi pemerintah yang ingin membangun sistem pelaporan keberlanjutan secara bertahap dan terukur, serta menjadi dasar pengembangan pelatihan atau penguatan kapasitas sumber daya aparatur dalam bidang tata kelola yang berwawasan lingkungan dan sosial. Dengan demikian, hasil penelitian ini berpotensi untuk berkontribusi pada perbaikan kinerja birokrasi daerah dan peningkatan kualitas kebijakan yang lebih inklusif, berjangka panjang, dan bertanggung jawab terhadap generasi mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Tinjauan Literatur

2.1.1. Teori Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Theory)

Teori keberlanjutan menjadi dasar penting dalam penelitian ini karena keberlanjutan merupakan sebuah konsep yang mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam jangka panjang. Dalam konteks pembangunan, keberlanjutan tidak hanya berfokus pada pencapaian target pembangunan saat ini, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap generasi mendatang. World Commission on Environment and Development (WCED) dalam laporan Brundtland (1987) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. (Amalia and Firmansyah 2024)

Dalam prakteknya, keberlanjutan mencakup tiga dimensi utama yang saling terkait, lingkungan hidup (environmental sustainability), aspek sosial (social sustainability), dan dimensi ekonomi (economic sustainability). Ketiga dimensi ini harus dijaga secara seimbang agar pembangunan yang dilakukan tidak menyebabkan kerusakan

lingkungan, ketimpangan sosial, maupun krisis ekonomi di masa depan. Oleh karena itu, pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan di tingkat lokal memegang peran penting dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

2.1.2. Teori Akuntabilitas (Accountability Theory)

Teori akuntabilitas menjelaskan bahwa setiap entitas, terutama sektor publik memiliki kewajiban moral dan hukum yang harus di pertanggungjawabkan. Hal ini menegaskan bahwa akuntabilitas sumber daya alam harus disertakan dengan penyampaian informasi yang jujur, transparan, relevan, dan dapat diverifikasikan kepada pemangku kepentingan.

Pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah merupakan penerapan dari prinsip-prinsip keberlanjutan yang disesuaikan dengan konteks lokal. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab strategis dalam menjamin bahwa setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di wilayahnya tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Dengan kata lain, pemerintah daerah harus mampu menyusun kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, tetapi juga memperhitungkan implikasi jangka panjang.

Dalam hal ini pemerintah daerah harus melakukan penyusunan laporan keuangan, laporan kinerja, serta pelaporan pembangunan

berkelanjutan yang juga mencantumkan penerapan akuntansi sosial – ekologi untuk dapat meningkatkan kepercayaan publik, transparansi, dan kualitas pengambilan keputusan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk merancang strategi pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat, sekaligus menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Salah satu bentuk konkret implementasi keberlanjutan di daerah dapat dilihat melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang seharusnya memuat sasaran pembangunan berkelanjutan sebagai prioritas utama.

2.1.3. Teori Keterbatasan Sumber Daya Manusia (Berbasis Resource Based View)

Teori keterbatasan sumber daya manusia berangkat dari kerangka Resource-Based View (RBV) yang diperkenalkan oleh *Barney (1991)*. RBV menjelaskan bahwa keunggulan dan kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya internal yang dimilikinya, baik berupa sumber daya fisik, finansial, maupun sumber daya manusia. Sumber daya manusia dianggap sebagai salah satu aset strategis yang memiliki nilai

(*valuable*), kelangkaan (*rare*), sulit ditiru (*inimitable*), dan sulit digantikan (*non-substitutable*) dikenal sebagai kriteria VRIN.

Dalam konteks organisasi sektor publik, sumber daya manusia bukan hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai penentu efektivitas implementasi tata kelola dan akuntabilitas publik. Namun, ketika organisasi mengalami keterbatasan dalam jumlah, kompetensi, maupun kapasitas sumber daya manusia, maka kondisi tersebut akan menciptakan hambatan internal yang berpengaruh langsung terhadap kinerja dan keberhasilan program pemerintah.

Keterbatasan sumber daya manusia dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti rendahnya tingkat pendidikan dan keahlian teknis, minimnya pemahaman terhadap sistem akuntansi keberlanjutan, serta lemahnya kapasitas analisis dalam pelaporan hasil pengelolaan emisi karbon. Dalam konteks implementasi akuntansi karbon di Provinsi Kalimantan Timur, keterbatasan ini tercermin dari belum optimalnya pemahaman aparatur pemerintah mengenai mekanisme pelaporan emisi, pengukuran kinerja keberlanjutan, dan pengelolaan dana insentif karbon yang telah diterima dari Bank Dunia melalui program FCPF–CF.

Menurut pandangan RBV, kondisi keterbatasan sumber daya manusia seperti ini dapat menghambat organisasi dalam menciptakan keunggulan institusional dan akuntabilitas yang berkelanjutan. Hal ini

disebabkan karena organisasi publik belum mampu mengonversi sumber daya internalnya menjadi kemampuan yang bernilai strategis. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan penguatan kompetensi aparatur menjadi elemen kunci untuk memastikan implementasi kebijakan keberlanjutan berjalan efektif dan akuntabel.

Dengan demikian, teori keterbatasan sumber daya manusia berbasis RBV menekankan bahwa keberhasilan implementasi akuntansi karbon dan pengelolaan insentif keberlanjutan di daerah sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengatasi keterbatasan sumber daya manusianya. Pengembangan kapasitas aparatur, pelatihan teknis, dan pembentukan budaya organisasi yang berorientasi pada keberlanjutan menjadi strategi penting agar sumber daya manusia dapat berfungsi sebagai penggerak utama, bukan sebagai hambatan dalam pengelolaan keberlanjutan sektor publik.

2.1.4. Keberlanjutan di Pemerintah Daerah

Konsep keberlanjutan (*sustainability*) dalam konteks sektor publik telah mengalami perkembangan signifikan, seiring dengan meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam kerangka *sustainable development*, pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai

pelaksana kebijakan pembangunan berkelanjutan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan lingkungan lokal.

Pembangunan keberlanjutan merupakan “pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri”. Prinsip ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk merancang kebijakan dan kegiatan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberlanjutan di pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia, komitmen pemimpin daerah, serta efektivitas sistem akuntabilitas publik. Misalnya, penelitian oleh rachman *et al.*(2021) menemukan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan lingkungan daerah sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan indikator keberlanjutan ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran. Sementara itu, banyak juga yang masih berpendapat bahwa masih terdapat kesenjangan antara kebijakan praktik keberlanjutan akibat keterbatasan pengetahuan teknis dan koordinasi antar instansi. (Salle and Wonar n.d.)

Dalam konteks Provinsi Kalimantan Timur, isu keberlanjutan menjadi semakin penting setelah daerah ini menjadi pionir dalam

implementasi program *Forest Carbon Partnership Facility – Carbon Fund* (FCPF – CF) yang dikelola oleh Bank Dunia. Keberhasilan Kaltim dalam menurunkan emisi karbon hingga mendapat insentif internasional sebesar USD 114,7 juta atau sekitar 1,78 triliun menunjukkan adanya komitmen terhadap prinsip keberlanjutan, meskipun pada tataran implementasi masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti keterbatasan kapasitas aparatur, koordinasi antarlembaga, dan mekanisme pelaporan keberlanjutan belum optimal.

Dengan demikian, literatur tentang tentang keberlanjutan di pemerintah daerah menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan keberlanjutan tidak hanya bergantung pada regulasi atau sumber dana, tetapi juga pada kemampuan kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia dalam menjalankan prinsip – prinsip *good governance*. Hal ini memperkuat relevansi penelitian mengenai implementasi akuntansi dan insentif keberlanjutan di tingkat pemerintah daerah, khususnya dalam konteks pengelolaan dana intensif karbon Kalimantan Timur.

2.1.5. Akuntansi karbon dan REDD+

Akuntansi karbon sendiri merupakan bagian dari akuntansi keberlanjutan yang berfokus pada pengukuran, pencatatan, dan pelaporan emisi gas rumah kaca (GRK) dalam satuan CO₂e (carbon dioxide equivalent). Tujuannya untuk memberikan transparansi dan dasar pengambilan keputusan terkait mitigasi perubahan iklim

sementara REDD+ (Reducing and Forest Degradation) merupakan mekanisme global yang memberikan pembayaran berbasis hasil (result-based payment) kepada negara atau daerah yang berhasil menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Di Kalimantan Tiimur sendiri program REDD+ dijalankan melalui skema Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) – Carbon Fund, di mana provinsi menerima insentif karbon yang kemudian didistribusikan untuk program perhutanan sosial, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi hutan. (Cetera 2022)

2.2 Studi Terdahulu

No	Penulis & Tahun	Judul	Metode	Relevansi
1.	Rahmasari (2024)	Optimalisasi Pelaporan Keberlanjutan di Sektor Publik Indonesia	Optimalisasi Pelaporan Keberlanjutan di Sektor Publik Indonesia	Menemukan bahwa penerapan pelaporan keberlanjutan di sektor publik masih terbatas. Hambatan utama: kurangnya regulasi yang mewajibkan, keterbatasan SDM, dan pemahaman aparatur.
2.	Sugianto (2025)	Implementasi Pendampingan Pelaporan Administrasi Keuangan Pemerintahan Desa Sukahening	Pendekatan partisipatif: observasi, wawancara, dokumentasi, evaluasi sebelum & sesudah pendampingan	Relevan untuk menggambarkan strategi capacity building aparatur pemerintah. Bisa diadopsi dalam konteks pendampingan aparatur Bappeda/Dinas Kehutanan dalam mengelola dana insentif karbon & melaporkannya dengan prinsip akuntansi keberlanjutan.
3.	Rahman (2024)	Pengungkapan Kinerja Sosial pada Aspek Sosial Instansi Pemerintah Daerah melalui Laporan Keberlanjutan (Studi	Kualitatif, Action Research (Penelitian Tindakan) + analisis	Menghasilkan simulasi laporan keberlanjutan berbasis GRI untuk aspek sosial (GRI 401-407). Menunjukkan pentingnya mengungkapkan kinerja sosial pemerintah daerah sebagai

		Kasus Bandung)	Pemkot	dokumen (RPJMD, RKPD, APBD, LKIP, LKPI, LKPD)	bentuk pertanggungjawaban publik.
--	--	-------------------	--------	---	---

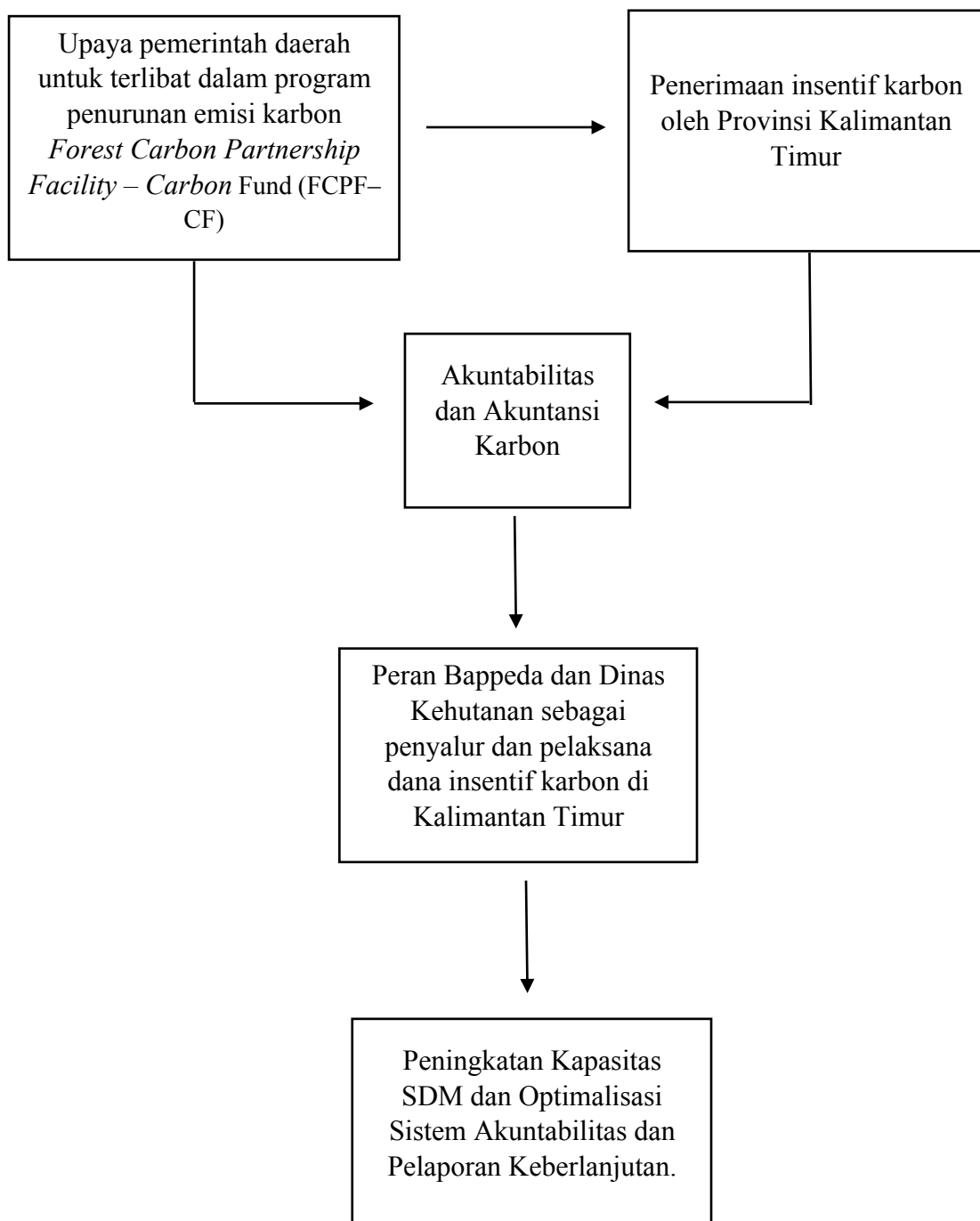
2.3 Kerangka Pemikiran

Provinsi Kalimantan Timur menjadi daerah pertama di Indonesia yang menerima insentif karbon dari bank dunia melalui program FCPF – CF, sehingga muncul kebutuhan untuk menerapkan akuntansi karbon yang transparan dan akuntabel. Namun, implementasi akuntansi karbon di pemerintah daerah masih menghadapi kendala utama berupa keterbatasan sumber daya manusia (SDM), baik dari segi pemahaman teknis, kemampuan analisis, maupun koordinasi antarinstansi.

Berdasarkan teori *Resource – Based View* (RBV), sumber daya manusia merupakan faktor internal strategis yang menentukan keunggulan organisasi. Keterbatasan SDM menyebabkan pemerintah daerah belum mampu mengelola dan melaporkan dana insentif karbon secara optimal.

Penerapan akuntansi karbon menjadi kunci untuk mengukur, mencatat, dan melaporkan aktivitas pengurangan emisi serta pemanfaatan dana insentif secara akuntabel. Jika kapasitas SDM dapat ditingkatkan, maka implementasi akuntansi akuntabel. Jika kapasitas SDM dapat ditingkatkan, maka implementasi akuntansi karbon akan memperkuat akuntabilitas publik dan mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. Dengan demikian, kerangka penelitian ini menegaskan bahwa keterbatasan sumber daya manusia berpengaruh terhadap

efektivitas implementasi akuntansi karbon, yang selanjutnya menentukan tingkat akuntabilitas dan keberlanjutan di pemerintah daerah.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif eksploratif. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan utama penelitian, yakni untuk menggali dan memahami secara mendalam bagaimana implementasi prinsip-prinsip keberlanjutan dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah di Kota Samarinda. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis atau menggeneralisasi temuan ke seluruh populasi, melainkan untuk menelaah dinamika sosial, kebijakan, serta persepsi aparatur pemerintah terhadap pembangunan berkelanjutan dalam konteks lokal.

Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini digunakan karena memungkinkan peneliti untuk masuk ke dalam dunia subjek penelitian (dalam hal ini, aparatur pemerintah) dan memahami apa yang mereka alami, rasakan, pikirkan, serta lakukan secara langsung berkaitan dengan implementasi keberlanjutan.

Penelitian kualitatif juga dianggap paling sesuai dalam mengkaji persoalan-persoalan yang bersifat multidimensional dan kontekstual seperti keberlanjutan, yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan sendiri adalah suatu konsep yang tidak hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menuntut adanya kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan keadilan sosial antar generasi. Oleh karena itu, kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam bagaimana aparatur pemerintah daerah menginterpretasikan, memahami, dan mengimplementasikan konsep akuntansi.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur, dengan fokus pada Dinas-dinas yang terkait langsung dengan pengelolaan keuangan dan pelaporan kinerja, yaitu:

- a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur, yang berperan dalam penyusunan dan pengawasan kebijakan pembangunan berkelanjutan.
- b) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, yang menjadi pelaksana teknis dalam program penurunan emisi karbon dan penerapan program REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*).

Pemilihan lokasi ini dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan keterlibatan langsung instansi tersebut dalam pengelolaan insentif karbon dari bank dunia melalui skema *Forest Carbon Partnership Facility – Carbon Fund* (FCPF – CF).

Penelitian dilaksanakan selama 1 bulan (September – Oktober 2025). Pemilihan lokasi didasarkan pada posisi strategis Kota Samarinda dalam implementasi reformasi akuntansi sektor publik dan potensi pengembangan sistem akuntansi yang mengintegrasikan aspek keberlanjutan.

3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini digunakan untuk memperjelas batas kajian agar penelitian lebih terarah dan sistematis. Fokus dalam penelitian ini mencakup empat empat aspek utama, yaitu:

- a) Pemahaman aparatur pemerintah terhadap konsep pembangunan berkelanjutan dan akuntansi karbon. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman konseptual dan teknis aparatur terhadap isu keberlanjutan.
- b) Implementasi prinsip keberlanjutan dalam perencanaan, kebijakan, dan pelaporan kinerja pemerintah daerah. Hal ini untuk melihat bagaimana prinsip keberlanjutan diintegrasikan ke dalam dokumen seperti RPJMD dan laporan program daerah.

- c) Akuntabilitas pengelolaan dana insentif karbon yang diterima dari bank dunia melalui program FCPF – CF. Fokus ini menilai bagaimana sistem pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan secara transparan dan sesuai prinsip *Good Governance*.
- d) Hambatan dan strategi peningkatan kapasitas aparatur dalam pelaksana kebijakan keberlanjutan. Aspek ini penting untuk mengidentifikasi keterbatasan sumber daya manusia, kebijakan maupun koordinasi antarinstansi.

3.4. Subjek dan Informan Penelitian

Subjek penelitian adalah aparatur pemerintah daerah yang terlibat langsung dalam pelaksana dan pengelolaan kebijakan keberlanjutan di Kalimantan Timur.

Informan ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian

Kriteria informan peneliti:

- a) Memiliki jabatan atau tugas yang terkait perencanaan atau implementasi kebijakan pembangunan
- b) Memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait isu keberlanjutan, lingkungan, atau akuntansi karbon.
- c) Bersedia memberikan informasi dan data yang relevan dengan topik penelitian

Informan berasal dari :

- a) Bappeda Provinsi Kalimantan Timur (bagian perencanaan dan pengawasan pembangunan berkelanjutan).
- b) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (bidang perencanaan program dan pengelolaan lingkungan).

3.5. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a) Data primer : Merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara mendalam (*in – depth interview*) dengan informan yang berkompeten, serta observasi lapangan terhadap aktivitas terkait implementasi kebijakan keberlanjutan.
- b) Data sekunder : Berasal dari dokumen resmi seperti laporan tahunan, laporan keberlanjutan, laporan program REDD+, publikasi pemerintah, dan dokumen kebijakan seperti RPJMD, atau peraturan daerah yang berkaitan dengan kebijakan lingkungan dan karbon.

Kombinasi kedua jenis data ini digunakan untuk memastikan informasi yang diperoleh lebih valid mendalam.

3.6. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang bersifat naturalistik untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang perspektif aparatur pemerintah terhadap implementasi keberlanjutan di Kota Samarinda.

3.6.1. Wawancara Mendalam (In-Depth Interview)

Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai pengalaman, persepsi, dan pemahaman informan mengenai penerapan prinsip keberlanjutan dan akuntabilitas pengelolaan dana karbon.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan panduan pertanyaan fleksibel agar peneliti dapat menyesuaikan dengan situasi lapangan.

A. Tema-tema Wawancara Utama:

1. Pemahaman Konsep Keberlanjutan dan Akuntansi Karbon

Tema ini bertujuan untuk menggali sejauh mana informan memahami konsep dasar keberlanjutan dan akuntansi karbon dalam konteks kebijakan pemerintah daerah. Peneliti ingin mengetahui apakah pemahaman aparatur pemerintah sejalan dengan prinsip – prinsip pembangunan berkelanjutan diamanatkan oleh pemerintah pusat serta pemahaman teknis mengenai pelaporann karbon yang menjadi dasar pemberian insentif dari Bank Dunia.

a) Definisi keberlanjutan menurut perspektif informan

Pertanyaan dalam bagian ini difokuskan untuk memahami bagaimana menafsirkan makna keberlanjutan dalam konteks pekerjaan dan kebijakan daerah. Adapun aspek yang dapat di eksplorasi yaitu :

- Bagaimana informan mendefinisikan keberlanjutan dalam konteks pembangunan daerah (apakah mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan)
- Pandangan informan mengenai peran pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.
- Pemahaman tentang keterkaitan keberlanjutan dengan kebijakan daerah seperti RPJMD, atau kebijakan REDD+
- Persepsi terhadap tanggung jawab moral dan administratif pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

b) Pengetahuan tentang akuntansi karbon dan pelaporan berbasis hasil

Bagian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana informan memahami konsep dan praktik akuntansi karbon serta pelaporan berbasis hasil yang digunakan dalam program insentif karbon. Adapun aspek yang diteliti meliputi:

- Pengetahuan informan tentang apa yang dimaksud dengan akuntansi karbon
- Pemahaman terhadap mekanisme pelaporan berbasis hasil yang menjadi dasar pemberian insentif oleh Bank Dunia
- Keterlibatan instansi dalam proses pengumpulan data emisi, verifikasi, dan pelaporan hasil kepada lembaga nasional atau internasional.
- Pemahaman informan terhadap manfaat dan tantangan penerapan akuntansi karbon di tingkat pemerintah daerah.
- Persepsi terhadap kesiapan SDM, infrastruktur data, dan kebijakan pendukung dalam melaksanakan pelaporan akuntansi karbon.

2. Mekanisme Pencatatan dan Pelaporan Dana Karbon

Tema ini bertujuan untuk menggali secara mendalam bagaimana proses pencatatan, penganggaran, serta pelaporan dana insentif karbon yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Mulai dari tahap penerimaan, penyaluran, hingga pertanggungjawaban keuangan. Selain itu, tema ini juga berupaya untuk memahami sejauh mana sistem akuntansi daerah mampu mengakomodasi transaksi dana karbon yang bersifat lintas – sektor dan berbasis hasil.

- a) Alur pencatatan penerimaan dana insentif karbon

Fokus utama pada bagian ini adalah untuk memahami bagaimana pemerintah daerah mencatat dan mengelola dana insentif karbon yang diterima dari program internasional seperti *Forest Carbon Facility – Carbon Fund* (FCPF – CF) dari Bank Dunia. Adapun aspek – aspek yang dapat digali dari informan, antara lain :

- Mekanisme penerimaan dana karbon, apakah dana diterima langsung oleh pemerintah provinsi atau melalui lembaga pengelola seperti BPD LH (Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup)
- Prosedur administrasi adalah dana diterima yaitu proses verifikasi, pencatatan di kas daerah, dan pelaporan kepada lembaga terkait.
- Pihak atau unit yang terlibat dalam proses pencatatan.
- Kebijakan atau pedoman akuntansi yang digunakan dalam mencatat dana tersebut
- Tantangan yang dihadapi dalam proses pencatatan, seperti keterbatasan sistem informasi, atau kurangnya panduan teknis dari pemerintah pusat.

Melalui eksplorasi ini, peneliti dapat mengetahui bagaimana praktik akuntansi di pemerintah daerah terhadap penyesuaian diri dengan pendapatan baru yang bersifat

“insentif berbasis kinerja lingkungan”, yang sebelumnya belum secara eksplisit diatur dalam struktur APBD.

b) Integrasi dengan sistem akuntansi daerah (SAP/APBD)

Bagian ini berfokus pada bagaimana penerimaan dan pengeluaran dana karbon diintegrasikan ke dalam Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adapun aspek – aspek yang digali dari informan berupa :

- Bagaimana dana insentif karbon diklasifikasikan dalam sistem akuntansi daerah
- Proses penyesuaian struktur APBD untuk mengakomodasi penerimaan dana karbon, termasuk kegiatan terkait dengan pelestarian lingkungan atau pembangunan berkelanjutan.
- Mekanisme pelaporan dana karbon
- Keterlibatan pejabat keuangan daerah dalam proses pencatatan dan audit dana karbon. Penilaian sejauh mana Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mampu merefleksikan transaksi berbasis hasil.
- Upaya integrasi antara laporan keuangan dengan laporan keberlanjutan agar pengelolaan dana karbon dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Hasil dari wawancara dengan tema ini diharapkan mampu menggambarkan sejauh mana akuntansi daerah siap dan

mampu mengakomodasikan instrumen baru seperti dana karbon, serta bagaimana pemerintah daerah menyesuaikan mekanisme pelaporan keuangannya agar sesuai dengan prinsip akuntabilitas keberlanjutan.

3. Tantangan dan Hambatan

Penelitian ini juga bertujuan untuk mencari berbagai kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan keberlanjutan dan akuntansi karbon, baik dari sisi sumber daya manusia, regulasi, infrastruktur teknologi, maupun koordinasi antar instansi dan pihak eksternal. Pemahaman terhadap hambatan ini penting untuk mengidentifikasi faktor – faktor penghambat efektivitas implementasi kebijakan serta untuk merumuskan rekomendasi perbaikan sistem pengelolaan dana insentif karbon di masa depan.

a) Kendala SDM, Regulasi, Teknologi, dan Koordinasi Antarinstansi

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Menggali sejauh mana kapasitas aparatur pemerintah daerah memadai dalam memahami konsep keberlanjutan, akuntansi karbon, serta mekanisme pelaporan berbasis hasil.

- Kendala Regulasi dan Kebijakan

Menelusuri sejauh mana kerangka regulasi yang ada ditingkat daerah yang mendukung pengelolaan dana karbon.

- Keterbatasan Teknologi dan Sistem Informasi

Mengetahui sejauh mana infrastruktur teknologi yang mendukung pencatatan serta pelaporan dana karbon

- Koordinasi Antarinstansi

Untuk mengetahui bagaimana dinamika hubungan antarorganisasi di tingkat daerah, seperti antara Bappeda dan Dinas Kehutanan.

- b) Koordinasi Dengan Pihak Eksternal (Bank Dunia Lembaga Verifikator)

Bagian ini menitikberatkan pada hubungan kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak eksternal, seperti lembaga verifikasi independen yang menilai kinerja penurunan emisi karbon.

3.7. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara dalam penelitian ini disusun sebagai panduan Untuk menggali informasi secara mendalam dari para informan yang terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kebijakan keberlanjutan di pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Pedoman ini bersifat semi – terstruktur, sehingga peneliti memiliki panduan pokok pertanyaan namun tetap memberi ruang bagi informan untuk memberikan penjelasan tambahan yang relevan. Setiap tema

dirancang untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana prinsip keberlanjutan dan akuntansib karbon diterapkan dalam kebijakan publik dan pengelolaan dana insentif karbon dari Bank Dunia melalui program FCPF – CF (*Forest Carbon Partnership Facility – Carbon Fund*). Adapun beberapa aspek utama yang digali dalam wawancara meliputi empat tema sebagai berikut :

1. Pemahaman aparatur pemerintah terhadap konsep keberlanjutan

Bagian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana aparatur pemerintah daerah memahami makna dari prinsip pembangunan berkelanjutan dalam konteks pelaksanaan program dan kebijakan di daerah. Adapun aspek yang digali meliputi :

- Pemahaman informan terhadap definisi keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan)
- Pandangan aparatur mengenai peran pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan pembangunan dan kelestarian lingkungan.
- Keterkaitan keberlanjutan dengan dokumen perencanaan seperti RPJMD.
- Persepsi aparatur terhadap tanggung jawab moral dan administratif dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

B. Bentuk Implementasi Prinsip Keberlanjutan Dalam Program Pembangunan

Bagian ini berfokus pada sejauh mana prinsip keberlanjutan diimplementasikan secara nyata dalam kebijakan dan program pembangunan daerah.

C. Mekanisme akuntabilitas, transparansi, dan keterlibatan masyarakat

Tema ini digunakan dalam pelaksanaan bagaimana prinsip *good governance* diterapkan dalam pelaksanaan kebijakan keberlanjutan dan pengelolaan dana insentif karbon.

D. Pengelolaan akuntansi karbon dan implementasi REDD+

Tema ini berfokus pada aspek teknis dan kelembagaan dalam pengelolaan dana insentif karbon, mulai dari pencatatan, pelaporan, hingga verifikasi hasil pengurangan emisi.

Pedoman wawancara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 1 (untuk Bappeda) dan Lampiran 2 (untuk Dinas Kehutanan) Lampiran 3 (Format Transkrip Wawancara)

3.8. Teknik Analisis Data

A. Reduksi Data (Data Reduction)

Menyeleksi, memfokuskan dan menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi agar relevan dengan fokus penelitian.

B. Penyajian Data (Data Display)

Menyusun data dalam bentuk tabel, atau narasi agar mudah dipahami dan dianalisis hubungan antarvariabel.

C. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Menarik makna dari hasil analisis penelitian dan melakukan verifikasi melalui sumber agar hasil penelitian kredibel.

Proses analisis dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data sehingga hasil yang diperoleh bersifat dinamis dan reflektif terhadap kondisi lapangan.

3.9. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian menjelaskan tahapan – tahapan yang dilakukan peneliti sejak persiapan hingga pelaporan hasil penelitian. Tahapan ini bertujuan agar penelitian dapat dilakukan secara sistematis, terarah, dan sesuai dengan kaidah ilmiah. Dalam penelitian ini prosedur pelaksanaan terdiri atas :

1. Tahap Persiapan

Tahap ini merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum peneliti terjun

ke lapangan. Pada tahap ini, beberapa kegiatan yang akan dilakukan yaitu:

a) Perumusan dan Penyusunan Proposal Penelitian

Peneliti menyusun rancangan penelitian yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan

pustaka dan literatur, serta metodologi yang akan digunakan.

b) Studi Pendahuluan dan Pengumpulan Informasi Awal

Peneliti melakukan penelusuran literatur dan dokumen awal yang relevan dengan topik keberlanjutan, akuntansi karbon, dan program REDD+ di Kalimantan Timur.

c) Penentuan Lokasi Penelitian dan Pemilihan Informan

Berdasarkan hasil studi awal peneliti menentukan lokasi penelitian di Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur karena kedua instansi tersebut terlibat langsung dalam pengelolaan program keberlanjutan dan dana insentif karbon. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

d) Penyusunan Pedoman Wawancara

Peneliti menyusun pedoman wawancara semi – terstruktur sebagai instrumen utama pengumpulan data untuk menggali informasi mendalam dari para informan.

2. Tahap Pengumpulan Data

Tahap ini merupakan inti dari proses penelitian, di mana peneliti melakukan pengumpulan data primer dan sekunder.

3. Tahap Analisis Data

Tahap ini dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data karena dalam penelitian kualitatif proses analisis bersifat dinamis dan berkelanjutan. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan membangun interpretasi teoretis terhadap fenomena yang diamati.

4. Tahap Pelaporan dan Hasil Penelitian

Tahap ini merupakan tahap akhir dari keseluruhan proses penelitian. Adapun kegiatan yang akan dilakukan meliputi :

a) Penyusunan Laporan Hasil Penelitian

Hasil temuan dari lapangan akan diolah dan disusun ke dalam bentuk laporan penelitian yang memuat uraian latar belakang, metodologi, hasil temuan, dan pembahasan.

b) Analisis dan Penarikan Kesimpulan

Peneliti menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis data dan memberikan rekomendasi yang relevan bagi pemerintah daerah terkait peningkatan akuntabilitas dan keberlanjutan pengelolaan dana karbon

Lampiran 1

Pedoman Wawancara Aparatur Bappeda

Tujuan: Menggali pemahaman dan peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan.

No Pertanyaan

1. Bagaimana Bappeda memahami konsep insentif karbon dalam konteks kebijakan pembangunan daerah?
2. Apa peran Bappeda dalam koordinasi program REDD+ dan implementasi FCPF–Carbon Fund di Kalimantan Timur?
3. Bagaimana mekanisme perencanaan dan pencatatan penggunaan dana insentif karbon di tingkat provinsi?
4. Apakah insentif karbon telah diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD atau RKPD?

5. Bagaimana proses pelaporan dan evaluasi penggunaan dana insentif karbon kepada pemerintah pusat atau lembaga donor (misalnya Bank Dunia)?
6. Sejauh mana keterlibatan Bappeda dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana insentif karbon?
7. Bagaimana koordinasi antara Bappeda dan Dinas Kehutanan dalam pelaksanaan dan pelaporan program REDD+?
8. Apa saja kendala utama dalam pengelolaan dana insentif karbon, khususnya terkait kapasitas SDM dan sistem pelaporan?
9. Menurut Anda, bagaimana cara meningkatkan efektivitas penggunaan dana insentif karbon di daerah?
10. Apa rekomendasi Anda untuk memperkuat sistem pelaporan, akuntabilitas, dan koordinasi antarinstansi dalam pengelolaan dana karbon?

Lampiran 2

Pedoman Wawancara Aparatur Dinas Kehutanan

Tujuan: Menggali peran Dinas Kehutanan dalam pengelolaan hutan, program perhutanan sosial, dan REDD+.

No Pertanyaan

1. Apa peran Dinas Kehutanan dalam pelaksanaan program REDD+ dan pengelolaan insentif karbon di Kalimantan Timur?
2. Bagaimana proses verifikasi penurunan emisi karbon dilakukan sebelum insentif diberikan?
3. Bagaimana mekanisme pelaporan data penurunan emisi kepada Bappeda, KLHK, dan lembaga verifikator internasional?
4. Apakah Dinas Kehutanan terlibat dalam penyaluran dan penggunaan dana insentif karbon (misalnya FCPF-CF)?

5. Bagaimana skema *benefit sharing* atau pembagian manfaat insentif karbon antara pemerintah pusat, provinsi, dan masyarakat lokal?
6. Apa tantangan terbesar dalam pengelolaan dana insentif karbon, baik secara administratif maupun teknis (pelaporan, koordinasi, SDM)?
7. Bagaimana keterlibatan masyarakat atau kelompok hutan dalam implementasi program yang dibiayai dari insentif karbon?
8. Bagaimana Dinas Kehutanan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana insentif tersebut?
9. Apakah ada sistem atau aplikasi khusus yang digunakan untuk pencatatan dan pelaporan karbon (CO₂ e)?
10. Apa dukungan yang dibutuhkan dari pemerintah daerah agar implementasi program karbon lebih efektif dan berkelanjutan?

Lampiran 3

Kode Informan	Jabatan / Instansi	Jawaban (Ringkasan)	Catatan Peneliti / Observasi

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, Rizky, and Amrie Firmansyah. 2024. "Urgensi Implementasi Laporan Keberlanjutan Pada Sektor Pemerintah." *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4(3): 452–62. doi:10.54957/jolas.v4i3.632.

Andani, Nia Nafilah, Wahyuni Wahyuni, Nilawati Nilawati, and Isnaini Ridwan. 2024. "The Impact of Social and Ecological Accounting in Forest Management." *Jurnal Impresi Indonesia* 3(7): 529–35. doi:10.58344/jii.v3i7.5238.

Cetera, Kenny. 2022. "Recognition of Forest Carbon Rights in Indonesia: A Constitutional Approach." *Lentera Hukum* 9(1): 151–76. doi:10.19184/ejllh.v9i1.29331.

Juan Hendrian Pratama, and Syaiful Rahman Soenaria. 2024. "Pengungkapan Kinerja Sosial Pada Aspek Sosial Instansi Pemerintah Daerah Melalui Laporan Keberlanjutan Berbasis Global Reporting Initiative." *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen* 3(3): 415–33. doi:10.30640/inisiatif.v3i3.2830.

- Rahmasari, Phobie Sherina, and Agus Bandiyono. 2025. "Optimalisasi Pelaporan Keberlanjutan Di Sektor Publik Indonesia: Strategi Mitigasi Perubahan Iklim." *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 13(1): 50–61.
doi:10.21067/jrma.v13i1.11703.
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, Iryanto Irvan Jaya. 2024. "No Title 濟無No Title No Title No Title." 2(2): 306–12.
- Salle, Agustinus, and Klara Wonar. "Between Compliance and Accountability : Exploring the Supply – Demand Gap in Sustainability Reporting of Jayapura City Government." : 1–10.
- Amalia, Rizky, and Amrie Firmansyah. 2024. "Urgensi Implementasi Laporan Keberlanjutan Pada Sektor Pemerintah." *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4(3): 452–62. doi:10.54957/jolas.v4i3.632.
- Andani, Nia Nafilah, Wahyuni Wahyuni, Nilawati Nilawati, and Isnaini Ridwan. 2024. "The Impact of Social and Ecological Accounting in Forest Management." *Jurnal Impresi Indonesia* 3(7): 529–35.
doi:10.58344/jii.v3i7.5238.
- Cetera, Kenny. 2022. "Recognition of Forest Carbon Rights in Indonesia: A Constitutional Approach." *Lentera Hukum* 9(1): 151–76.
doi:10.19184/ejllh.v9i1.29331.
- Juan Hendrian Pratama, and Syaiful Rahman Soenaria. 2024. "Pengungkapan Kinerja Sosial Pada Aspek Sosial Instansi Pemerintah Daerah Melalui

Laporan Keberlanjutan Berbasis Global Reporting Initiative.” *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen* 3(3): 415–33.
doi:10.30640/inisiatif.v3i3.2830.

Rahmasari, Phobie Sherina, and Agus Bandiyono. 2025. “Optimalisasi Pelaporan Keberlanjutan Di Sektor Publik Indonesia: Strategi Mitigasi Perubahan Iklim.” *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 13(1): 50–61.
doi:10.21067/jrma.v13i1.11703.

Rifka Alkhilyatul Ma’rifat, I Made Suraharta, Iryanto Irvan Jaya. 2024. “No Title 濟無No Title No Title No Title.” 2(2): 306–12.

Salle, Agustinus, and Klara Wonar. “Between Compliance and Accountability : Exploring the Supply – Demand Gap in Sustainability Reporting of Jayapura City Government.” : 1–10.